



RENCANA STRATEGIS 2017-2019

DIREKTORAT SEJARAH



**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sejarah tahun 2017-2019 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Renstra Direktorat Sejarah Tahun 2017-2019 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan sejarah yang hendak dicapai dalam periode 2017-2019 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan kebudayaan hingga saat ini. Renstra Direktorat Sejarah 2017-2019 ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang sejarah di pusat dan daerah, serta partisipasi seluruh elemen di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Renstra Direktorat Sejarah Tahun 2017-2019 merupakan dasar dan pedoman bagi Sub Direktorat – Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Sejarah, dan sebagai acuan dalam menyusun (1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP); (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL); (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Direktorat Sejarah serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan bidang sejarah dan nilai budaya secara terintegrasi, sinergis, dan berkesinambungan. Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mohon masukan dan saran untuk perbaikan Renstra ini ke depan, karena sifat dari Renstra adalah dinamis.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Sejarah

Triana Wulandari

NIP. 19621213 198803 0 002

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG

Sejarah memiliki nilai yang sangat penting dan berharga di kehidupan masa depan, karena sejarah merupakan saksi sekaligus bukti yang tidak saja menggambarkan realitas dan kenangan indah, tapi juga menyuguhkan kearifan dan kebenaran yang bisa dijadikan pelajaran bagi keberlangsungan hidup bangsa ini.

Kita pun menyadari bahwa kebudayaan Indonesia terkenal dengan corak dan ragamnya, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebudayaan bangsa yang meliputi berbagai adat istiadat, tradisi serta sikap hidup masyarakat tersebut, terwujud dalam berbagai karya dan cipta, maupun warisan peninggalannya, yang merupakan bentuk nilai budaya yang mewarnai jati diri bangsa Indonesia. Dengan keberadaan nilai budaya tersebut, maka akan terbentuklah karakter bangsa di seluruh lapisan masyarakat.

Peranan penting sejarah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercermin pada kebijakan

Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara. Sebagai pelaksanaan dari kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut di atas telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri dimaksud memberikan mandat kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai Unit Kerja setingkat Eselon I untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan.

Pengintegrasian Sejarah dalam pendidikan

Sebagai bentuk integrasi sejarah ke dalam bidang pendidikan diperlukan peningkatan pelayanan sejarah melalui:

- a. Pengayaan bahan pustaka bidang sejarah di bidang pendidikan;
- b. Pembenahan bahan pembelajaran sejarah di bidang pendidikan;
- c. Pemenuhan media pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam sejarah Indonesia;
- d. Penguatan kurikulum pembelajaran sejarah;
- e. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang sejarah.

Untuk memperkuat integrasi fungsi sejarah dalam pendidikan perlu penguatan budaya di masyarakat melalui pemberian fasilitasi sarana untuk Komunitas Sejarah, kegiatan berupa pemberian fasilitasi dahulu belum mempunyai standar dan kriteria yang jelas, untuk itu diperlukan pembuatan POS dan akreditasi dari komunitas sejarah yang akan difasilitasi.

Dalam kerangka pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi bidang sejarah tersebut, maka sejalan dengan integrasi sejarah dalam bidang Pendidikan khususnya menjadi Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu disusun Rencana Strategis pembangunan Bidang Sejarah yang akan menjadi dasar pihak dan arahan pelaksanaan pembangunan bidang sejarah di Indonesia.

PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

Jati Diri

Berbeda dari binatang, manusia memiliki kesadaran. Kesadaran manusia bukan hanya terbatas pada kesadaran akan fakta (*fact*) belaka, melainkan juga merambah luas ke kawasan nilai (*value*). Oleh karena itu, hidup manusia bukan hanya tenggelam dalam kepungan fakta, melainkan dapat bertransendensi menjangkau ke alam nilai-nilai. Itulah mengapa, setiap tindakan manusia yang waras (baik tindakan "batiniah" maupun tindakan "lahiriah"), pastilah bermakna, karena setiap tindakan manusia bukan hanya merupakan gerakan mekanistik seperti mesin atau instingtif seperti hewan belaka, melainkan dilandasi atau dijiwai oleh nilai-nilai tertentu yang diyakininya, baik yang diakui dan dirumuskan secara tegas-tegas atau pun yang hanya diyakini secara diam-diam. Jadi, nilai-nilailah yang secara normatif merupakan acuan bagi perilaku kehidupan bangsa.

Apabila subjeknya bangsa Indonesia, maka acuan perilaku bangsa Indonesia ialah nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur yang dimaksud ialah seperangkat nilai yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bersama sebagai bangsa yang menegara.

Jikalau nilai-nilai luhur itu merupakan ideal-ideal yang diidamkan Bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi referensi bagi perilaku dalam mengarungi kehidupan, yang apabila semuanya berlangsung secara konsisten dan konsekuen, maka akan tampaklah identitas atau "jati diri" bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia itu tidak lain merupakan sifat dan perilaku khas bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Karakter

Kata "karakter" berasal dari bahasa Yunani "karakter" yang berarti "tanda" (*mark*), "tanda khusus", atau "ciri khas". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "karakter" berarti: sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; watak. Menurut *The Encyclopaedia of the Social Sciences*, istilah karakter secara umum menunjuk organisasi sifat khas yang membedakan satu individu dari individu yang lain. Dalam arti yang paling luas, istilah karakter itu berpadanan arti dengan individualitas; namun dalam diskusi praktis, istilah tersebut terutama berlaku untuk kelompok sifat yang memiliki makna sosial dan moral. Dalam *Collier's Encyclopedia* dikatakan bahwa istilah karakter, apabila ditelusur ke belakang, ternyata sudah digunakan kira-kira abad ke-5 SM. Pada masa itu istilah karakter digunakan untuk menunjuk "tanda khas" atau "ciri khas" dari individu yang berkaitan dengan ideal-ideal dan perilaku sebagaimana diputuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kekuatan kehendak. Sementara itu, dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah karakter dirujuk dan dipadankan dengan istilah watak, yang dimaknai sebagai keseluruhan dari segala macam perasaan dan kemauan; menampak keluar sebagai kebiasaan, cara bereaksi terhadap dunia luar, dan pada ideal-ideal yang diidam-idamkannya. Watak seseorang berdasarkan insting, bakat kemauan, dan bakat perasaan orang yang bersangkutan. Bagaimana watak seseorang terbentuk bergantung kepada pengalamannya.

Dari nukilan atas sumber-sumber di atas dapat dicatat sejumlah kata kunci yang penting berkenaan dengan istilah karakter. Secara etimologis, istilah karakter sendiri berarti "ciri khas". Disebut ciri khas, karena "barang sesuatu" atau hal yang ditunjuk tersebut berbeda dari yang lain. Makna etimologis saja tentu belum cukup untuk menggambarkan konsep yang dikandung oleh istilah karakter. Secara terminologis, istilah karakter mengandung sejumlah komponen makna yang penting, di antaranya:

- (1) organisasi sifat yang khas (berbeda dari yang lain);
- (2) memiliki makna sosial (dalam kaitannya dengan hidup bersama dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu);
- (3) memiliki makna moral (berkenaan dengan perbuatan apa yang dianggap "baik" atau "buruk/jahat");

- (4) bekerjanya kehendak (berkenaan dengan tekad dan keteguhan hati);
- (5) cara bereaksi atau bertindak atau berperilaku dalam menghadapi kehidupan yang senantiasa berada dalam ketegangan antara kenyataan faktual (realitas telanjang sebagaimana dihadapi dalam keseharian) atau das Sein dan ideal-ideal yang diidamkannya (nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi) atau das Sollen.

Tampak bahwa secara teoritik, istilah karakter ternyata tidak dengan mudah dirumuskan dengan sederhana dan dalam satu tarikan nafas belaka. Di samping itu, istilah karakter acapkali juga dikacaukan dengan temperamen, kepribadian, dan moralitas. Meskipun harus diakui, ketiga istilah itu memang selalu bersinggungan dengan karakter, bahkan dapat dikatakan ketiganya merupakan semacam komponen atau dimensi karakter.

Memang tidak mudah menyederhanakan makna yang dikandung istilah karakter, namun dalam keperluan perencanaan ini, konsep karakter harus dirumuskan sebagai suatu "definisi operasional" agar diperoleh "kiblat" atau "pegangan". Karakter ialah sekumpulan sifat khas yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya. Rumusan ini menunjuk kepada subjek individual, karena pada dasarnya karakter sesungguhnya berkenaan dengan individu. Namun dalam konteks perencanaan ini, yang hendak dikaji ialah karakter bangsa. Dengan menyebut karakter bangsa, yakni bangsa Indonesia, berarti diam-diam sudah diandaikan bahwa suatu bangsa dianggap sebagai suatu entitas komunitas yang nyata. Kalau demikian, maka yang dimaksud dengan karakter bangsa Indonesia ialah sekumpulan sifat khas bangsa Indonesia yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya.

Pembangunan kebudayaan pada intinya ialah pembangunan manusia. Membangun manusia berarti bukan hanya membangun dimensi keragaan atau jasmaniahnya belaka, melainkan sekaligus membangun dimensi kejiwaan atau batiniahnya. Membangun dimensi kejiwaan atau batiniah manusia, berarti membangun dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas manusia dalam menghadapi kenyataan hidup

dengan segala tantangan dan problematikanya. Dan, dalam konteks keindonesiaan, secara lebih spesifik lagi ialah membangun dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas bangsa dalam menghadapi tantangan dan problematika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas bangsa, tidak lain adalah pembangunan jati diri dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pembangunan jati diri dan karakter bangsa merupakan salah satu pilar penting, bahkan paling penting, bagi pembangunan kebudayaan secara keseluruhan.

Pembangunan jati diri dan karakter bangsa amat penting bagi pencapaian cita-cita luhur atau visi utama Bangsa Indonesia yang telah bertekad melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan mendirikan negara dan pemerintahan sendiri, yakni ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, didirikanlah negara Republik Indonesia dan dibentuklah Pemerintah Indonesia yang tugas pokoknya ialah (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah misi utama didirikannya negara, yang direpresantasikan dalam tugas pokok pemerintahan negara. Para penyenggara negara, yakni aparatur negara dari pusat hingga daerah atau unit terkecil pemerintahan negara, beserta seluruh komponen bangsa, yang nota bene merupakan warga negara Indonesia, manusia Indonesia, dituntut memiliki jati diri dan karakter yang mampu menopang upaya pencapaian visi dan misi negara tersebut.

Karakter bangsa harus dibangun dengan sungguh-sungguh dan pembangunan itu harus merupakan usaha sadar yang terencana, terarah, dan sistematis agar karakter bangsa dapat mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yakni sifat dan perilaku khas Bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berlangsung secara seksama dan menghantarkan Bangsa Indonesia menuju kepada kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pembangunan nasional kebudayaan, artinya dalam setiap upaya pembangunan harus selalu memikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter. Dengan demikian, dapat diharapkan karakter yang terbentuk nantinya akan mengarah ke hal yang bernilai positif. Jati diri dan karakter bangsa di sini berada pada tataran ide, maksudnya tidak berbentuk secara nyata atau empiris, tetapi hanya dapat dirasakan dampaknya. Jika karakter bangsa ini memang baik, maka hal itu akan terasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, karakter bangsa ini merupakan hal yang vital bagi pembangunan nasional kebudayaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 1-2).

1.2.

LANDASAN HUKUM

Sebagai bidang yang terintegrasi di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka landasan hukum Renstra Bidang Sejarah ini merujuk kepada landasan hukum sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- g. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- h. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- i. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- j. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- k. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- l. Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- m. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- n. Peraturan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- o. Keputusan Presiden No.121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
- p. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Renstra K/L 2015-2019;
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.35 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019.

1.3.

PARADIGMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Paradigma pembangunan kebudayaan pada tahun 2015-2019 meliputi 4 (empat) aspek pembangunan kebudayaan, antara lain:

a. **Pembangunan Kebudayaan yang Mendorong Terwujudnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.**

Setiap kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan nantinya harus senantiasa mendorong terwujudnya penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara.

b. **Pembangunan kebudayaan yang menegakkan UUD 1945**

Setiap kebijakan pembangunan kebudayaan harus berlandaskan pada konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. **Pembangunan Kebudayaan yang Mendorong Terwujudnya Bhineka Tunggal Ika**
Sebagai suatu bangsa dengan kehidupan yang multikultur dan multietnis, maka pembangunan kebudayaan harus dapat menghargai keanekaragaman budaya yang dibawa oleh setiap suku bangsa, tetapi tetap pada kebijakan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan di dalam keanekaragaman tersebut.

d. **Pembangunan Kebudayaan yang Meneguhkan NKRI**

Setiap kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tetap meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4.

KONDISI UMUM

I. Kondisi Umum Direktorat Sejarah

Direktorat Sejarah baru dibentuk pada tahun 2014 setelah terjadinya pengintegrasian fungsi pendidikan dengan fungsi kebudayaan. Sejak tahun 2014-2017, Direktorat Sejarah telah melakukan beberapa pencapaian yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Buku Sejarah

Buku sejarah yang disusun sejak tahun 2014-2017 berjumlah 43 buku dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2014 disusun sebanyak 12 buah buku yaitu Buku Hasil Sarasehan Nasional Guru Sejarah se Indonesia, Buku Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia Jilid III,IV, dan V, Buku Sejarah Presiden-Presiden Republik Indonesia, Buku Saka Widya Budaya Bhakti, Buku Hasil Penyempurnaan Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia, Buku Kajian Pemetaan Sejarah dan Nilai Budaya, Buku Penerjemahan Sejarah Sriwijaya karya Itsing, dan Buku SKK/TKK dan Panduan Kursus Pamong dan Instruktur Saka Widya Budaya Bhakti (3 buku).
2. Tahun 2015 disusun sebanyak 12 buah buku yaitu Buku Penyempurnaan Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia, Buku Silabus Saka Widya Budaya Bhakti Krida Bidang Kebudayaan, Buku Pengayaan Materi Sejarah, Buku Kepemimpinan Tradisional di Indonesia, Buku Sejarah Diaspora Etnis Melanesia, Buku Sejarah tentang Berita Proklamasi di Indonesia, Buku Tokoh Pemikir Karakter Bangsa, Buku Hasil Verifikasi Nilai Budaya Bahari, Buku Hasil Verifikasi Nilai Budaya Agraris, dan Atlas Sejarah Arsitektur Tradisional di Indonesia.
3. Tahun 2016 disusun sebanyak 19 buah buku yaitu President of The Republic of Indonesia, Buku Indonesia Islamic Culture in Historical Perspective, Buku The Melanesian Diaspora in Indonesia From Prehistory to the Present, Buku Pendampingan Sejarah di Sekolah, Buku Aspek-aspek Perkembangan Peradaban di Kawasan Timur (Maluku dan Suwu). Buku Sejarah Bencana Gempa Bumi di Sumatera, Buku Sejarah Topini Kota Pantai di Sulawesi, Atlas Arsitektur Seri III, Buku Jalur Rempah, Jurnal Sejarah, Empat Buku Pendokumentasian Sumber Sejarah Tertulis, Buku Pedoman Penulisan

Peristiwa Sejarah, Buku Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah, Buku Standar Kajian Sumber Sejarah, dan Dua Buku Apresiasi Penguatan Nilai Sejarah.

4. Tahun 2017 disusun sebanyak 30 buah buku yaitu 15 buku tentang Pengayaan Materi Sejarah untuk SD, SMP, dan SMA, Buku Tokoh Inspiratif, Buku Pahlawan Nasional (Gubernur-Gubernur Pertama Pasca Kemerdekaan), Dua Buku Kamus Sejarah Indonesia, Buku Materi Film Sejarah, Indeks Beranotasi Karya Ki Hadjar Dewantara, Indeks Sumber Sejarah Agresi Militer Belanda, Sumber Sejarah Lisan Revolusi Hijau di Indonesia, Buku Saka Widya Budaya Bakti Bidang Sejarah, Buku Sejarah Jalur Rempah, Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia, Dua Buku Jurnal Abad, Beranda Sejarah, dan Data Sejarah Pahlawan Nasional.

b. Even Sejarah

Sejak Tahun 2014 even sejarah yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Lawatan Sejarah Nasional yang diikuti oleh siswa/i tingkat SLTA seluruh Indonesia sebanyak 100 orang. Sejak 2014 sudah dilaksanakan di Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bengkulu.
2. Kemah Budaya Nasional yang diikuti oleh pramuka penggalang seluruh Indonesia sebanyak 750 orang dan bekerja sama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Sejak tahun 2014 sudah dilaksanakan di Siak Sri Indrapura, Solo, Belitung, dan Palangkaraya.
3. Pekan Nasional Cinta Sejarah yang diikuti oleh mahasiswa seluruh Indonesia sebanyak 1.000 orang. Sejak 2014 sudah dilaksanakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.
4. Kemah Guru di Wilayah Perbatasan yang diikuti oleh guru-guru sejarah tingkat SLTA atau sederajat sebanyak 100 orang. Sejak tahun 2014 sudah dilaksanakan di Sebatik, Pulau Rote, dan Siak Sri Indrapura-Bengkalis.

c. Persemaian Nilai Sejarah Sebagai Penguat Karakter Bangsa

Kegiatan ini diselenggarakan melalui nonton bareng film inspiratif untuk memperkuat karakter bangsa. Sasaran yang dituju adalah kabupaten/kota yang belum memiliki akses bioskop dan diikuti oleh 1.500 orang peserta yang terdiri dari siswa SD-SMA dan guru serta tenaga kependidikan di setiap lokasinya. Sejak tahun 2014-2017 dilaksanakan di:

1. Tahun 2014: Buton, Ende, Kuantan Singingi, Lampung Timur, Mojokerto. Musi Banyuasin, Nunukan, Sorong, Tana Toraja, Tanah Datar, Belitung, Tidore
2. Tahun 2015: Muna, Maluku Tengah, Jayapura, Bitung, Polewali Mandar, Sumba Barat Daya, Hulu Sungai Utara, Sanggau, Gunung Mas, Bulungan, Lombok Timur, Passer, Purwakarta, Cilacap, Purworejo, Siak, Solok Selatan,

Subang, Tangerang, Karo, Nganjuk, Pidie, Probolinggo, Bangka Barat, dan Bintan.

3. Tahun 2016: Bireuen, Asahan, Solok, Bengkulu Selatan, Prabumulih, Metro, Serang, Sumedang, Wonosobo, Lamongan, Karangasem, Bima, Singkawang, Kapuas, Tabalong, Kutai Kertanegara, Tomohon, Boalemo, Kolaka, dan Parepare.
4. Tahun 2017: Magelang, Temanggung, Parigi Moutong, Padangpanjang, Bengkalis, Solok, Bungo, Ngawi, Kep. Seribu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka, Mamasa, Pinrang, Indramayu, Cilegon, Nunukan, Samarinda, Sidenreng Rappang, dan Sibolga.

Total sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 sudah dilaksanakan di 76 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

1.5.

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

I. Analisis Lingkungan Strategis Secara Makro/Global-Nasional

Analisis lingkungan strategis secara makro/global-nasional yang dihadapi dalam pengembangan sejarah antara lain:

- a. Agenda Pembangunan Pasca MDG 2015
- b. Geopolitik Kebudayaan
- c. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang dan jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, termasuk tenaga kerja di bidang sejarah khususnya.

- d. Perkembangan Industri Budaya

Perkembangan industri budaya yang menciptakan SDM yang profesional dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya budaya, membantu masyarakat dan swasta sebagai pelaku utama, menjadikan pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulator, serta menciptakan nilai manfaat ekonomi yang signifikan.

- e. Visi Pemerintahan 2014-2019 (Kemandirian Budaya dan Revolusi Mental)

Revolusi mental sebagai pondasi pembangunan mental bangsa Indonesia ke depan. Dimensi rekonstruksi mental mencakup 3 hal yaitu: Sehat, Cerdas, dan Berkepribadian. Pemerintahan baru akan berusaha secara terencana, bertahap, dan terstruktur mentransformasikan Indonesia menuju bangsa yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadiann dalam kebudayaan.

- f. Integrasi Pendidikan dan Kebudayaan

Integrasi bukan sekedar menggabungkan (menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi menyatukan 'merging' fungsi kebudayaan dan pendidikan. Disini peran sejarah sangat penting bagi integrasi pendidikan karakter dan jatidiri bangsa. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat upaya untuk membangun insan Indonesia yang berpengetahuan dan berbudaya (beradab).

II. Analisis Lingkungan Strategis Secara Mikro (Per-Isu Strategis)

Isu strategis pembangunan kebudayaan yang berkaitan dengan pengembangan sejarah antara lain:

1. Penguatan Jati Diri Bangsa

Potensi yang terdapat dalam pengembangan sejarah yang mendukung penguatan jati diri bangsa adalah:

- a. Besarnya sumber daya sejarah dan nilai budaya yang dapat ditemukan di seluruh nusantara sebagai modal penting dalam pembangunan bidang kebudayaan (khususnya pembangunan jati diri dan karakter bangsa);
- b. Eksistensi lembaga kajian sejarah dan nilai budaya (UPT) yang berada di berbagai daerah maupun di lingkungan perguruan tinggi sebagai unsur penting dalam pengembangan sejarah dan nilai budaya;
- c. Keberadaan komunitas-komunitas sejarah seluruh Indonesia yang sangat potensial untuk jadi tempat pendidikan karakter bangsa dan penguatan jati diri bangsa yang berkaitan dengan sejarah;
- d. Munculnya penulisan sejarah lokal di seluruh Indonesia yang mampu menjadi sumber baru dalam pendidikan karakter dan penguatan jati diri bangsa.

2. Sejarah dan Warisan Budaya

Potensi yang terdapat dalam pengembangan sejarah dan warisan budaya adalah:

- a. Potensi dan kekayaan warisan budaya yang sangat besar sebagai modal pembangunan bidang kebudayaan melalui perlindungan – pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
- b. Besarnya jumlah museum di seluruh Indonesia yang dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan bidang kebudayaan, pelestarian warisan budaya serta apresiasi warisan budaya bagi masyarakat luas;
- c. Eksistensi lembaga pelestarian cagar budaya (UPT) yang berada di berbagai daerah maupun lingkungan perguruan tinggi serta dinas/SKPD di daerah sebagai unsur penting dalam penguatan upaya pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

3. Sumber Daya Kebudayaan

Potensi yang terdapat dalam pengembangan sejarah yang mendukung sumber daya kebudayaan adalah:

- a. Disusunnya standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang sejarah yang dapat menjadi standarisasi dalam profesi keahlian sejarah di Indonesia;
- b. Dimulainya pemetaan tentang tenaga profesi bidang sejarah di Indonesia yang diharapkan mampu menjadi agen dalam pembangunan dan pendidikan karakter bangsa.

III. Permasalahan Secara Makro

Permasalahan secara makro yang dihadapi dalam pengembangan bidang sejarah antara lain:

- a. Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa;
- b. Minimnya apresiasi terhadap nilai-nilai kesejarahan;
- c. Pelestarian sejarah dan warisan budaya belum efektif;

- d. Belum optimalnya pendidikan bagi tenaga pendidik bidang sejarah yang akan mengajarkan pendidikan karakter kepada peserta didik di sekolah;
- e. Pengembangan sumber daya bidang sejarah belum maksimal;
- f. Belum optimalnya pengintegrasian data-data kesejarahan di Indonesia.

IV. Permasalahan Secara Mikro

Permasalahan secara mikro dalam pengembangan sejarah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Jati Diri dan Karakter Bangsa

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sejarah yang berkaitan dengan jati diri dan karakter bangsa antara lain:

1. Adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
2. Rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan;
3. Menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial dan;
4. Menguatnya nilai-nilai primodialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

b. Sejarah dan Warisan Budaya

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sejarah yang berkaitan dengan sejarah dan warisan budaya antara lain:

1. Belum tersedianya basis data tentang sejarah;
2. Terbatasnya upaya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah;
3. Kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti penting warisan budaya seperti situs, candi, istana, monumen dan tempat bersejarah lainnya yang memiliki kandungan nilai luhur sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang dapat menginspirasi berkembangnya budaya kreatif yang memiliki nilai ekonomi;
4. Terbatasnya SDM di bidang sejarah.

c. Sumber Daya Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sejarah yang berkaitan dengan sumber daya kebudayaan antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya manusia bidang sejarah yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran SDM bidang

sejarah serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan baik pada tingkat pusat maupun daerah;

2. Belum adanya sertifikasi bagi profesi bidang sejarah yang mengakibatkan rendahnya daya saing SDM bidang sejarah;
3. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan sejarah;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang sejarah termasuk pemanfaatan teknologi;
5. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan tentang pengembangan sejarah;
6. Belum tersedianya sistem pendataan bidang sejarah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan;
7. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

V. Tantangan Pengembangan Sejarah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sejarah untuk masa yang akan datang antara lain:

- a. Pemberdayaan profesi kesejarahan dalam mengembagkan sejarah;
- b. Memperkuat karakter dan jati diri bangsa yang menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong, dengan cara: mengoptimalkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wadah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakkan hukum; melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan berbagai media komunikasi dan informasi.
- c. Meningkatkan apresiasi nilai-nilai sejarah dengan cara: menyediakan sarana dan prasarana aktualisasi bidang sejarah, mendukung penggalan sumber sejarah, memfasilitasi penulisan bidang sejarah, dan mendukung pelestarian nilai-nilai kesejarahan di masyarakat.

Bab **2**

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1.

VISI – MISI DITJEN KEBUDAYAAN

VISI “TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN INDONESIA YANG **MANDIRI** DAN **BERMARTABAT** “

PENJELASAN VISI :

KEBUDAYAAN INDONESIA	:	Keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia
MANDIRI	:	Memiliki kelenturan, ketahanan, berjatidiri serta keunggulan saing sehingga mampu menjadi sarana dalam pelestarian nilai-nilai dan warisan budaya untuk kemanfaatan yang luas bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat
BERMARTABAT	:	Mampu menjaga derajat dan citra serta posisi bangsa dalam pergaulan dunia serta membangun peradaban dunia dalam arti seluas-luasnya

VISI “TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN INDONESIA YANG **MANDIRI**
DAN **BERMARTABAT**”

MISI

1.	MEMPERKUKUH KARAKTER BANGSA YANG TANGGUH, KOMPETITIF, BERAKHLAK MULIA, DINAMIS DAN BERORIENTASI IPTEK
2.	MENINGKATKAN KUALITAS DAN APRESIASI ATAS KARYA BUDAYA YANG UNGGUL DALAM MENGGANGKAT MARTABAT BANGSA
3.	MENINGKATKAN PELESTARIAN NILAI SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT LUAS
4.	MENINGKATKAN DAYA SAING BUDAYA BANGSA DALAM MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN TURUT BERPERAN MEMBANGUN PERADABAN DUNIA
5.	MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PELESTARIAN KEBUDAYAAN YANG RESPONSIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

2.2.

VISI – MISI DIREKTORAT SEJARAH

Visi Direktorat Sejarah:

“Meningkatkan Kesadaran Pemahaman Sejarah Guna Penguatan Jati Diri dan Karakter Bangsa”

Misi Direktorat Sejarah:

1. Memperkuat basis data dan informasi dan referensi tentang sejarah
2. Meningkatkan inventarisasi dan revitalisasi nilai-nilai sejarah
3. Meningkatkan pengembangan kajian sejarah dalam mendukung pembentukan jati diri dan pembangunan karakter bangsa
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah
5. Meningkatkan aktualisasi dan adaptasi sejarah dalam kehidupan bermasyarakat
6. Meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah
7. Meningkatkan pemberdayaan komunitas sejarah

2.3.

ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN DIREKTORAT SEJARAH

Arah Kebijakan Direktorat Sejarah:

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sejarah

Tujuan Direktorat Sejarah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
3. Pembinaan dan pelestarian sejarah;
4. Peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang kesejarahan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
8. Pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah;
9. Pelaksanaan dokumentasi sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
11. Pelaksanaan administrasi Direktorat Sejarah.

2.4.

SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT SEJARAH

Sasaran Strategis Direktorat Sejarah adalah:

1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kesejarahan yang Berkualitas;
 - Indikator Kinerjanya adalah meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia bidang Kesejarahan yang ditingkatkan kompetensinya dari 2.590 orang pada tahun 2017 menjadi 7.950 pada tahun 2019.
2. Meningkatnya pengetahuan sejarah yang mendukung pendidikan karakter;
 - Indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah buku sejarah yang disusun dan ditulis dari 35 buku pada tahun 2017 menjadi 108 buku pada tahun 2019.
3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengapresiasi event sejarah;
 - Indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah event sejarah yang diapresiasi masyarakat dari 43 even pada tahun 2017 menjadi 141 even pada tahun 2019.
4. Meningkatnya Komunitas Kesejarahan yang menerima fasilitasi;
 - Indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah komunitas sejarah yang menerima fasilitasi dari 70 komunitas pada tahun 2017 menjadi 240 komunitas pada tahun 2019.
5. Meningkatnya Informasi dan Basis Data Kesejarahan;
 - Indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah jumlah data sejarah yang diinventarisir dan dikelola dari 25 data pada tahun 2017 menjadi 90 data pada tahun 2019.
6. Meningkatnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Kesejarahan;
 - Indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sejarah yang disusun dari 3 dokumen pada tahun 2017 menjadi 18 dokumen pada tahun 2019.

2.5.

TATA NILAI DIREKTORAT SEJARAH

Tata Nilai Direktorat Sejarah adalah:

1. Integritas
2. Kreatif dan Inovatif
3. Etos Kerja
4. Gotong Royong
5. Apresiatif

Bab 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Sejarah

Arah Kebijakan Direktorat Sejarah:

“Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Nilai Sejarah Untuk Memperkokoh Pembangunan Karakter Bangsa”

Strategi Direktorat Sejarah:

1. Penguatan basis data, informasi dan referensi tentang sejarah
2. Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai-nilai sejarah untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan.
3. Penguatan pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang bersifat lintas generasi yang dilandasi nilai-nilai sejarah
4. Pemberdayaan komunitas pemerhati sejarah

3.2

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SEJARAH



Tugas dan Fungsi

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SEJARAH

TUGAS:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah.

FUNGSI:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan tenaga kesejarahan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan tenaga kesejarahan;
- c. pembinaan dan pelestarian sejarah;
- d. peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
- e. pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang kesejarahan;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan dan pengembangan tenaga kesejarahan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, dan internalisasi nilai sejarah serta pembinaan dan pengembangan tenaga kesejarahan;
- h. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah;
- i. pelaksanaan dokumentasi di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kesejarahan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kesejarahan; dan
- k. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Bab 4

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1

Target Kinerja

PENGEMBANGAN SEJARAH						
	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Baseline	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber daya Manusia Bidang Kesejarahan yang Berkualitas	SDM Bidang Kesejarahan yang ditingkatkan Kompetensinya	2.590	2.590	2.650	2.710
2	Meningkatnya pengetahuan sejarah yang mendukung penguatan pendidikan karakter	Buku Sejarah yang disusun dan ditulis	33	35	36	37
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengapresiasi event sejarah	Event sejarah yang diapresiasi oleh masyarakat	40	43	48	50
4	Meningkatnya Komunitas Kesejarahan yang menerima fasilitas	Komunitas Kesejarahan yang menerima fasilitas	55	70	80	90

4.2

Kerangka Pendanaan

4.2.

KERANGKA PENDANAAN

NO.	KEGIATAN/AKTIVITAS	ALOKASI 2017-2019 (Rp. Milyar)			Total Alokasi 2017-2019 (Rp. Milyar)
		2017	2018	2019	
	Pengembangan Sejarah	71,666	66,682	71,666	210,014
1	SDM Bidang Kesejarahan yang ditingkatkan Kompetensinya	5,469	4,074	5,469	15,012
2	Meningkatnya pengetahuan sejarah yang mendukung penguatan pendidikan karakter	10,935	8,407	10,935	30,277
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengapresiasi event sejarah	31,431	35,879	31,431	98.741
4	Meningkatnya Komunitas Kesejarahan yang menerima fasilitasi	10,833	8,145	10,833	29,811

Pemantauan dan Evaluasi

TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Sejarah 2017-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program Sejarah di setiap satuan, jenjang, dan jenisnya.

PRINSIP-PRINSIP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan andal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja; dan (11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut (1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; (3) peningkatan

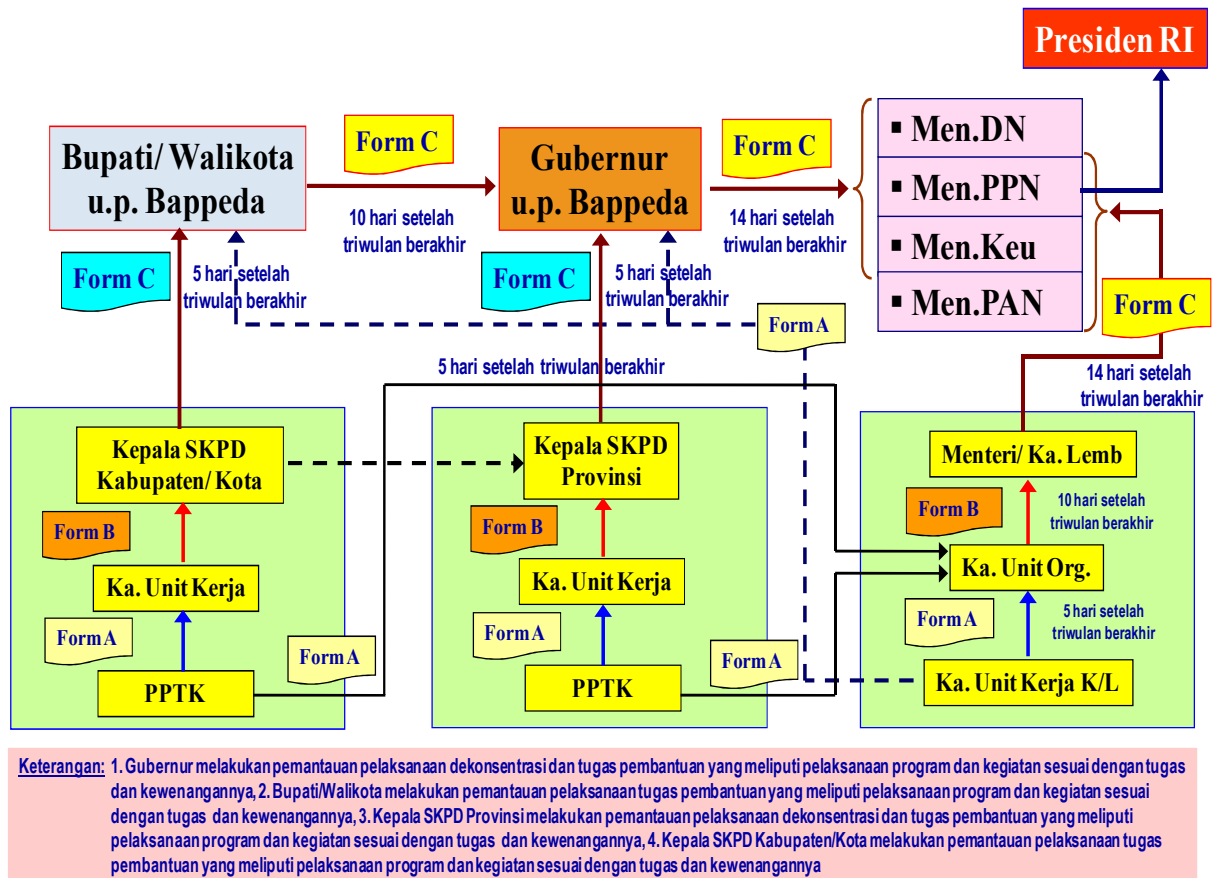
tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Kota, Dinas Kebudayaan Kecamatan, dan Satuan Pendidikan.

RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemdikbud meliputi: (a) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (b) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemdikbud, (c) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (d) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemdikbud, (e) evaluasi akhir masa Renstra.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH PEMERINTAH

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan Bidang Sejarah dan Nilai Budaya.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan, serta evaluasi program dan kegiatan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENSTRA OLEH SKPD PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA SATUAN KEBUDAYAAN

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut.

a. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Kebudayaan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan sejarah dan nilai budaya di tingkat provinsi; (b) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan kebudayaan; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kebudayaan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2015-2019; (b) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan kebudayaan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan kebudayaan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

c. Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Kebudayaan

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan kebudayaan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan kebudayaan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

Bab 5

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sejarah Tahun 2017–2019 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan sejarah di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Kemendikbud, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pengembangan sejarah hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Direktorat Sejarah telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Direktorat, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Direktorat Sejarah. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Direktorat Sejarah, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pengembangan sejarah yang hendak dicapai pada periode 2015–2019. Renstra merupakan dasar dan acuan dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Direktorat Sejarah; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemdikbud ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan

demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pengembangan sejarah selama lima tahun mendatang.